

**DAFTAR NAMA PEJABAT LINGKUP POLBANGTAN YOMA  
YANG WAJIB MENGISI LHKPN TAHUN 2021**

*update 6 April 2022*

No	Nama	Keterangan
1	Bambang Sudarmanto	Sudah mengajukan, sedang di verifikasi KPK
2	Irwan Johan Sumarno	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
3	Acep Perdinan	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
4	Bambang Dwi Hardjanto	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
5	Joko Suryono	Sudah mengajukan, sedang di verifikasi KPK (ada
6	Eka Yuni Lestari	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
7	Novi Perwitasari	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
8	Any Murhartati Savitri	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
9	Ary Fitria Rohmawati	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
10	Puji Astuti	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
11	Hasan Azhari	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
12	Syfa Pamulih Sukmaningrum	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
13	Riesky Kurniawan Joko Praptono	Sudah mengajukan, ada bukti lapor
14	Umi Hani Islamiyah	Sudah mengajukan, ada bukti lapor



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BAMBANG SUDARMANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **496924**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 880.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 341 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 183 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 131.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5E AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 13.900.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 286.710.865**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.312.110.865**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.312.110.865

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EKA YUNI LESTARI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 835042

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 332.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m<sup>2</sup>/108 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 267 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 165 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 122.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, DAIHATZHU MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 8.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 68.590.544**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	530.590.544
III. HUTANG	Rp.	101.091.420
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	429.499.124

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYFA PAMULIH SUKMANINGRUM
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 840590

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m <sup>2</sup> /110 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , LAINNYA Rp. 750.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	83.000.000
1. MOBIL, TOYOTA ETIOS 1.2 G M/T Tahun 2013, LAINNYA Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 3C1 Tahun 2009, LAINNYA Rp. 7.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	17.500.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	120.791.065
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	971.291.065
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	971.291.065

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIESKY KURNIAWAN JOKO PRAPTONO
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 716102

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 302.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m<sup>2</sup>/180 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA  
MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 302.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 23.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA DX Tahun 1982, HIBAH TANPA AKTA  
Rp. 15.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 325.000.000

**III. HUTANG** Rp. 99.764.790

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 225.235.210

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ACEP PERDINAN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 786786

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 9.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 21.073.445**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 230.073.445

**III. HUTANG** Rp. 184.392.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 45.681.445

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BAMBANG DWI HARDJANTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **229847**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 165.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/80 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 119.050.000

1. MOTOR, YAMAHA X-RIDE MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.500.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.550.000
5. MOTOR, SUZUKI RC100 RC100 Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 11.400.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.778.912

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 304.228.912

**III. HUTANG** Rp. 144.653.422

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 159.575.490

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.